

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Disusun oleh :

FIRMANSAH HANDIKA RAMADHAN

115020100111033

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Malang

Yang disusun oleh :

Nama : Firmansah Handika Ramadhān
 NIM : 115020100111033
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehesif.

Malang, 30 November 2017
Mengetahui,

Sekretaris
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dosen Pembimbing,



Putu Mahardika Adi S., SE, M.Si, MA, Ph.D.
NIP. 19760910 200212 1 003



Prof. Dr. Drs. M Umar Burhan, M.S.
NIP. 19460810 197412 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Malang"

Yang disusun oleh :

Nama : Firmansah Handika Ramadhan
NIM : 115020100111033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1. Prof. Dr. Drs. M Umar Burhan, MS. NIP. 194608101974121002 (Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA. NIP. 1955081519840310002 (Dosen Penguji I)
3. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA. NIP. 197101111998021001 (Dosen Penguji II)

Handwritten signatures of the three members of the examination board.

Malang, 20 Desember 2017

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Firmansah Handika Ramadhan**
 Tempat, tanggal lahir : **Jakarta 17 Maret 1993**
 NIM : **115020100111033**
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
 Konsentrasi : **Ekonomi Sumber Daya**
 Alamat : **Pisang Kipas d'Cluster Kav.9**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Malang

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 November 2017

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. M Umar Burhan, M.S.
NIP. 19460810 197412 1 002

Yang membuat pernyataan,



Firmansah Handika R
115020100111033

Mengetahui,
Sekretaris
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Putu Mahardika Adi S., SE, M.Si, MA, Ph.D.
NIP. 19760910 200212 1 003



RIWAYAT HIDUP



Nama : Firmansah Handika Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Maret 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon/HP : 083877033266
Email : handika1703@gmail.com
Alamat : Komplek Joglo Baru Jakarta Barat, 11640

Riwayat Pendidikan :

- SDN 09 Jakarta Barat (1999-2005)
- SMPN 206 Jakarta Barat (2005-2008)
- SMAN 65 Jakarta Barat (2008-2011)
- Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang (2011-2018)

Pengalaman Kerja :

- Staf magang bidang statistik Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2015



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Segala perjuangan dan kenangan selama perkuliahan serta proses penyusunan skripsi telah memberikan sebuah kesan yang mendalam dan berharga bagi penulis secara pribadi. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak akan lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Umar Burhan, MS. selaku dosen pembimbing Skripsi penulis, terima kasih atas pengetahuan, bantuan, support dan arahnya dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Khusnul Ashar, SE., MA. dan Bapak Dr. Moh.Khusaini, SE., M.Si, MA. selaku dosen penguji yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta para Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

6. Orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta Adik adik yang terus memberikan dukungannya kepada penulis.

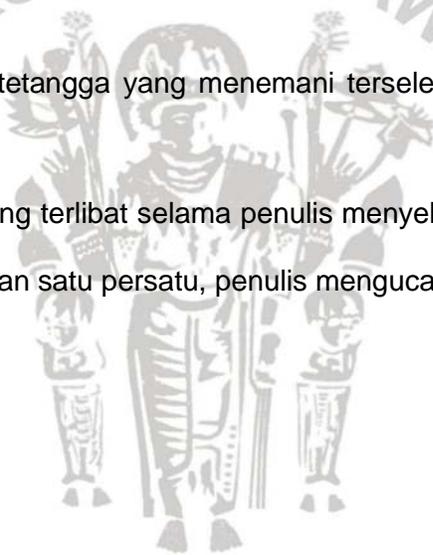
7. Semua keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik moril maupun materil.

8. Teman sejak semester 1 maba, Tri Utomo, Agus, Dio, Tetuko, Risdiana, Anchy, Setiya Bhakti, Dexa, dan Panji Terimakasih atas dukungan kalian.

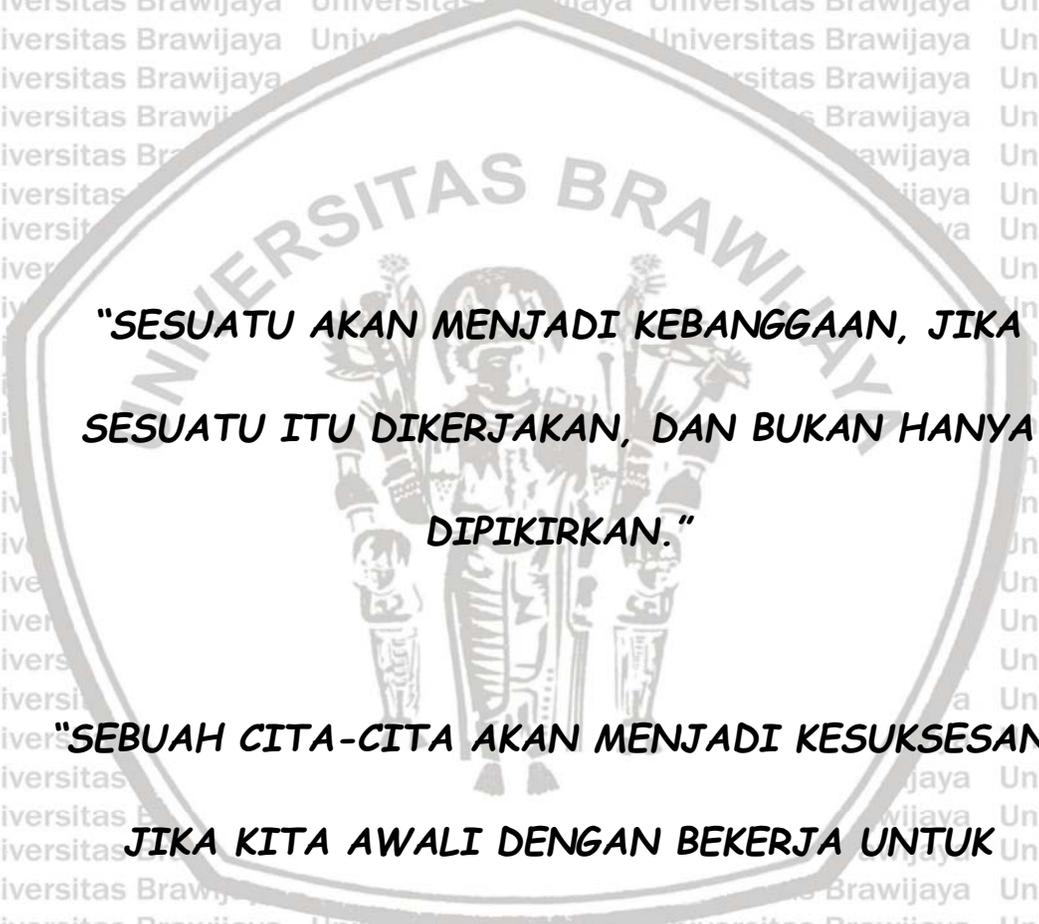
9. Teman Seperjuangan skripsi di detik-detik terakhir yaitu Razi, Danar, Ali, Rizky, dan Aris. Terimakasih sudah saling mendukung sehingga bisa menyelesaikan studi bersama-sama.

10. Teman dari negara tetangga yang menemani terselesaikannya skripsi ini 김소정, 김찬미, 임나연, dll.

11. Dan semua pihak yang terlibat selama penulis menyelesaikan studi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan Terima kasih Banyak.



MOTTO



**"SESUATU AKAN MENJADI KEBANGGAAN, JIKA
SESUATU ITU DIKERJAKAN, DAN BUKAN HANYA
DIPIKIRKAN."**

**"SEBUAH CITA-CITA AKAN MENJADI KESUKSESAN,
JIKA KITA AWALI DENGAN BEKERJA UNTUK
MENCAPAINYA, BUKAN HANYA MENJADI IMPIAN"**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Malang”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM. Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa sinyal bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi dari dampak perubahan kebijakan yang diterapkan, tetapi skripsi ini juga bukan merupakan skripsi yang sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima berbagai kritik dan saran untuk mencapai

hasil yang lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 20 Desember 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Masalah Pokok	9
	1.3. Tujuan Penelitian.....	10
	1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	2.1. Landasan Teori	12
	2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia	12
	2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	14
	2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia ...	15
	2.1.2.2 Komponen-Komponen IPM	16
	2.1.2.3 Gambaran IPM Jawa Timur	18
	2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	19
	2.1.4 Kemiskinan	22
	2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan	22
	2.1.4.2 Kriteria Miskin Menurut BPS	23
	2.1.4.3 Penyebab Kemiskinan	25
	2.1.4.4 Karakteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin	27
	2.1.5 Pengeluaran Pemerintah	27





2.1.6. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan), dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM.....	29
2.1.6.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM	29
2.1.6.2 Hubungan antara Tingkat Kemiskinan Dengan IPM.....	33
2.1.6.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM	36
2.2. Penelitian-Penelitian Sebelumnya	38
2.3. Kerangka Pikir	40
2.4. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2. Jenis dan Sumber Data	44
3.3. Metode Analisis.....	44
3.4. Definisi Operasional Variabel	48
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin, Pengeluaran pemerintah, dan IPM	50
4.2. Uji Asumsi Klasik	55
4.3. Analisis Hasil Regresi.....	58



4.4. Uji Koefisien Determinasi	60
4.5. Uji Statistik F	61
4.6. Pengujian Hipotesis Secara Parsial	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran - Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan IPM	7
Tabel 2.1	Gambaran IPM Jawa Timur.....	18
Tabel 4.1	Perkembangan Pertumbuhan ekonomi	51
Tabel 4.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan	52
Tabel 4.3	Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan	53
Tabel 4.4	Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan	54
Tabel 4.5	Kolmogorov – SmirnofTest	55
Tabel 4.6	Collinearity Statistic	56
Tabel 4.7	Scatterplot	57
Tabel 4.8	Durbin – Watson	58
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Menggunakan SPSS	59
Tabel 4.10	Anova	60





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 42



ABSTRAKSI

Ramadhan, Firmansah Handika (2018), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Malang. Skripsi, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *regresi linier berganda*. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* berupa Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang mulai tahun 2000 - 2015.

Dari hasil analisis penelitian ini maka dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: *Human Development Report*, 2000)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang

termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of

Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah.

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus

5
disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam

peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Studi Alesina dan Rodric (Meier dan Rauch, 2000) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk

kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Data publikasi BPS memperlihatkan bahwa secara absolute, Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Malang telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang (2000-2015)

Tahun	IPM
2000	64.52
2001	64.78
2002	65.20
2003	65.82
2004	66.44
2005	66.92
2006	68.39
2007	69.07

Tahun	IPM
2008	69.55
2009	70.09
2010	70.54
2011	71.17
2012	71.94
2013	72.34
2014	73.03
2015	73.72

Sumber: BPS, 2015

Tingkat kenaikan yang semakin bertambah ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah untuk bidang pembangunan manusia mengalami kemajuan yang semakin baik, meski relatif lambat. Pergerakan kemajuan kualitas hidup manusia di wilayah Kabupaten Malang masih relatif lambat, berarti hal ini menunjukkan adanya potensi yang masih belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu agar perkembangan peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Malang dapat berkembang lebih cepat, maka kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut komponen-komponen pembangunan manusia lebih ditingkatkan lagi.

IPM Kabupaten Malang tahun 2013 meningkat sedikit lebih tinggi dari tahun 2012 yaitu dari 71,53 menjadi 72,14, berarti naik 0,61. Capaian IPM tahun 2013 tersebut termasuk dalam kelompok kriteria "Menengah Atas". Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Malang menunjukkan tingkatan yang perlu diapresiasi karena secara rata-rata menunjukkan karegori "Menengah Atas".

Bahkan dari 33 (tiga puluh tiga) kecamatan, secara keseluruhan berada pada

kriteria yang sama yaitu “Menengah Atas”. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan criteria capaian IPM di Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang**”.

1.2 Masalah Pokok

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto* saja tetapi melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi yang sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia.

Salah satu permasalahan pembangunan manusia di Kabupaten Malang, yaitu Capaian kinerja IPM Kabupaten Malang memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Kabupaten Malang ke level yang diharapkan. Capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan laju pertumbuhan serta penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Kabupaten Malang mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar. Sementara itu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan masih relatif minim.

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang? ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan manusia di Kabupaten Malang.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i jurusan Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi sekarang, melainkan juga generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan.

Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan

dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari

Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (infant mortality rate); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan

Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

- X₁ = Indeks harapan hidup
- X₂ = Indeks pendidikan
- X₃ = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

Dimana:

- I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana i = 1,2,3
- X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i
- Max X_i = Nilai maksimum X_i
- Min X_i = Nilai minimum X_i

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i}$$

2.1.2.2 Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini



adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia

dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

2.1.2.3 Gambaran IPM Di Jawa Timur

Tabel 2.1 IPM Jawa Timur Tahun 2015

No	Wilayah	IPM	No	Wilayah	IPM	No	Wilayah	IPM
1	Kota Malang	80.05	14	Tulungagung	70.07	27	Tuban	65.52
2	Kota Madiun	79.48	15	Nganjuk	69.90	28	Pasuruan	65.04
3	Kota Surabaya	79.47	16	Lamongan	69.84	29	Pacitan	64.92
4	Sidoarjo	77.43	17	Jombang	69.59	30	Situbondo	64.53
5	Kota Blitar	76.00	18	Madiun	69.39	31	Bondowoso	63.95
6	Kota Kediri	75.67	19	Kediri	68.91	32	Probolinggo	63.83
7	Kota Mojokerto	75.54	20	Ngawi	68.32	33	Pamekasan	63.10
8	Kota Pasuruan	73.78	21	Ponorogo	68.18	34	Jember	63.04
9	Gresik	73.57	22	Blitar	68.13	35	Lumajang	63.02
10	Kota Batu	72.63	23	Banyuwangi	68.08	36	Sumenep	62.38
11	Magetan	71.39	24	Trenggalek	67.25	37	Bangkalan	61.49
12	Kota Probolinggo	71.01	25	Malang	66.63	38	Sampang	58.18
13	Mojokerto	70.85	26	Bojonegoro	66.17		Jawa Timur	68.95

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2015 (Metode Baru)

Pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Pada tahun 2015, IPM Jawa Timur telah mencapai 68,95. Angka ini meningkat sebesar 0,81 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Timur pada tahun 2014 yang sebesar 68,14.

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang berada pada peringkat ke 25 di Jawa timur dengan nilai 66.63.

Hal ini masih di bawah nilai rata-rata Jawa timur yaitu 68.95. Sedangkan nilai tertinggi diperoleh Kota Malang dengan 80.05, dan 3 terendah berada di wilayah Madura yaitu Sumenep, Bangkalan, dan Sampang.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Suryana (2000:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak.

Menurut Boediono (dalam Robinson Tarigan, (2004), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004) pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu "the law of deminishing return" dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus pengahambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berfikir tradisional.

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa (Suryana, 2000:57):

- a. Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b. Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk.
- c. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai "stationary state", yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.
- d. *The law of deminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58):

- a. Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.

e. Aspek internasioanl yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Selanjutnya dalam Sadono (2004:437), menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

3. Teori pertumbuhan ekonomi modern

a. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya "*The Stages of economic*" (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, yaitu (Lincoln, 2004:48):

- 1) *The traditional society* (masyarakat tradisional)
- 2) Persyaratan tinggal landas
- 3) Tinggal landas
- 4) Menuju kematangan
- 5) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi

b. Teori pertumbuhan modern menurut Kuznet

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya

2.1.4 Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Delina Hutabarat (1994), menyebutkan sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang ditanggung komunitas yaitu:

1. Kemiskinan Subsistensi yaitu penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan Perlindungan yaitu lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
3. Kemiskinan Pemahaman yaitu kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan, dan potensi untuk

mengupayakan perubahan. 4. Kemiskinan Partisipasi yaitu tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. 5. Kemiskinan Identitas yaitu terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. 6. Kemiskinan Kebebasan yaitu stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 2240 kg, 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori *food* dan *nonfood* diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan.

2.1.4.2 Kriteria Miskin Menurut BPS

BPS membuat 14 kriteria penduduk yang termasuk didalam golongan miskin yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dinyatakan miskin.

2.1.4.3 Penyebab Kemiskinan

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic Dualism*, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population Growth*, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and The Environment*, yaitu adanya sebuah pandangan kedepan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang efisien, yang tidak asal melakukan eksploitasi yang dapat menurunkan produktivitas sumber daya tersebut.
5. *Natural Cycles and Processes*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis =, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal terus-menerus.
6. *The Marginalization of Woman*, yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

7. *Cultural and Ethnic Factors*, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat keagamaan.
8. *Exploitative Intermediation*, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
9. *Internal Political Fragmentation and Civil strife*, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International Processes*, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu : 1. *Natural Assets*; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. 2. *Human Assets*; menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 3. *Physical Assets*; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. 4. *Financial Assets*; berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 5. *Social Assets*; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

2.1.4.4 Karakteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin

Emil Salim (1976) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah : 1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri. 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu : 1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan, 2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. 3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja). 4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*). 5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya.

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis, dan pengaguran.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesebroto, 1994)

Menurut Suparmoko (1994:78), bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak termasuk self liquiditing dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

2.1.6 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap IPM

2.1.6.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan penelekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesjahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya

produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Ramirez dkk (dalam Gustav Ranis 2004) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (two-way relationship) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi.

Studi Ramirez berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (human development). Hubungan yang dimaksudkan oleh Ramirez dkk tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke human development.

GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah; civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga. Dalam membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung membelanjakan barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan yang tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga, siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Umumnya, penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia dan andil perempuan cukup besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.

Ketika tingkat kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan per kapita atau karena buruknya distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan, reduksi kemiskinan sangat bervariasi dengan distribusi pendapatan dan berubah-ubah. Pereduksian distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pertumbuhan sangat tergantung pada proses

pertumbuhan ekonominya- secara khusus didasarkan pada penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan pedesaan.

Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi pengeluaran sector public untuk sector pembangunan manusia, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan. Peranan alokasi pengeluaran public oleh pemerintah ini sangat memegang peranan yang sangat penting didalam pembangunan manusia.

Peranan organisasi masyarakat dan LSM memegang peranan sebagai factor pendukung dan pelengkap didalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia akan menjadi lebih efektif apabila peranan organisasi masyarakat dan LSM menempati salah satu ruang pembangunan manusia.

Kedua adalah dari human development ke pertumbuhan ekonomi

Memerhatikan hubungan kedua, dari pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi, ada sebuah asumsi dan didukung oleh pembuktian, bahwa masyarakat yang lebih sehat, dipelihara dengan baik dan berpendidikan akan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi. Tingginya pembangunan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.

Jelas bahwa kesehatan dan pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam komposisi dan pertumbuhan output dan ekspor. Kesehatan dan pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu factor penting di dalam membangun sebuah sistem produksi dengan penggunaan teknologi secara efektif. Pendidikan

dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan modal manusia, mendorong peningkatan produktifitas masyarakat (tenaga kerja), mendorong kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi dan mepergunakan teknologi didalam produksi serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kapasitas dan teknikal teknologi dalam industry.

Peningkatan modal manusia, peningkatan produktifitas, kemampuan mengadaptasi dan menggunakan teknologi dalam produksi dan kemampuan mengadaptasi perubahan kapasitas dan teknikal teknologi tersebut pada akhirnya akan mendorong perekonomian suatu negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembangunan manusia ini juga membutuhkan investasi yang besar dan diikuti juga dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dengan investasi dan pemerataan pendapatan tersebut pada akhirnya akan mempermudah peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Menurut UNDP (1995) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (balanced) dan tidak seimbang (unbalanced). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (strong link) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (weak link) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang” (unbalanced link) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya.

Istilah modal manusia (human capital) pertama kali dikemukakan oleh Gary S. Becker. Ace Suryadi (1994) (Dalam Boediono 1999). yang mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Sejak tahun 1999, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberinama Human Development Index atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.6.2 Hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan IPM

Menurut UNDP (1995) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan

mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Apriliyah S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari jumlah penduduk miskin tersebut, atau dengan kata lain dengan berkurangnya penduduk miskin maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien.

Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

2.1.6.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan

mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri, 2005).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesebroto, 1994).

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan

kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006, Dalam Irna 2015).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

2.2. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Febrianto M. (2009), dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia" bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi,

pengangguran dan inflasi. Hasil dari regresi yang ditunjukkan dalam penelitiannya menunjukkan hubungan dari variabel-variabel antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin adalah negatif sedangkan pada sisi yang lain menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi dengan penduduk miskin adalah positif. Artinya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada sisi lain pengangguran dan inflasi harus dikurangi.

Penelitian yang dilakukan Lanjouw, dkk (2001) yaitu dengan menganalisis bagaimana hubungan antara kemiskinan, pendidikan dan kesehatan beserta kaitannya dengan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik. Penelitian dengan metode statistik deskriptif ini menemukan bahwa penduduk miskin sangat membutuhkan pelayanan/subsidi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Lanjouw dan kawan-kawan juga hendak membuktikan report Bank Dunia tahun 1990 bertajuk "Indonesia: *Strategy for a sustained Reduction in Poverty*" yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang critical (sangat mendesak) untuk diberikan kepada penduduk miskin di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan peningkatan investasi di kedua bidang tersebut.

Dalimunthe dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, menganalisa pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Dalam

persamaan model, jumlah penduduk miskin adalah sebagai variabel terikat sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian (dummy variabel) adalah sebagai variabel bebas. Analisis perhitungan merekomendasikan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa sekitar 85,86%. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada di dalam model. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen signifikan sebesar 1% terhadap jumlah penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia" bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

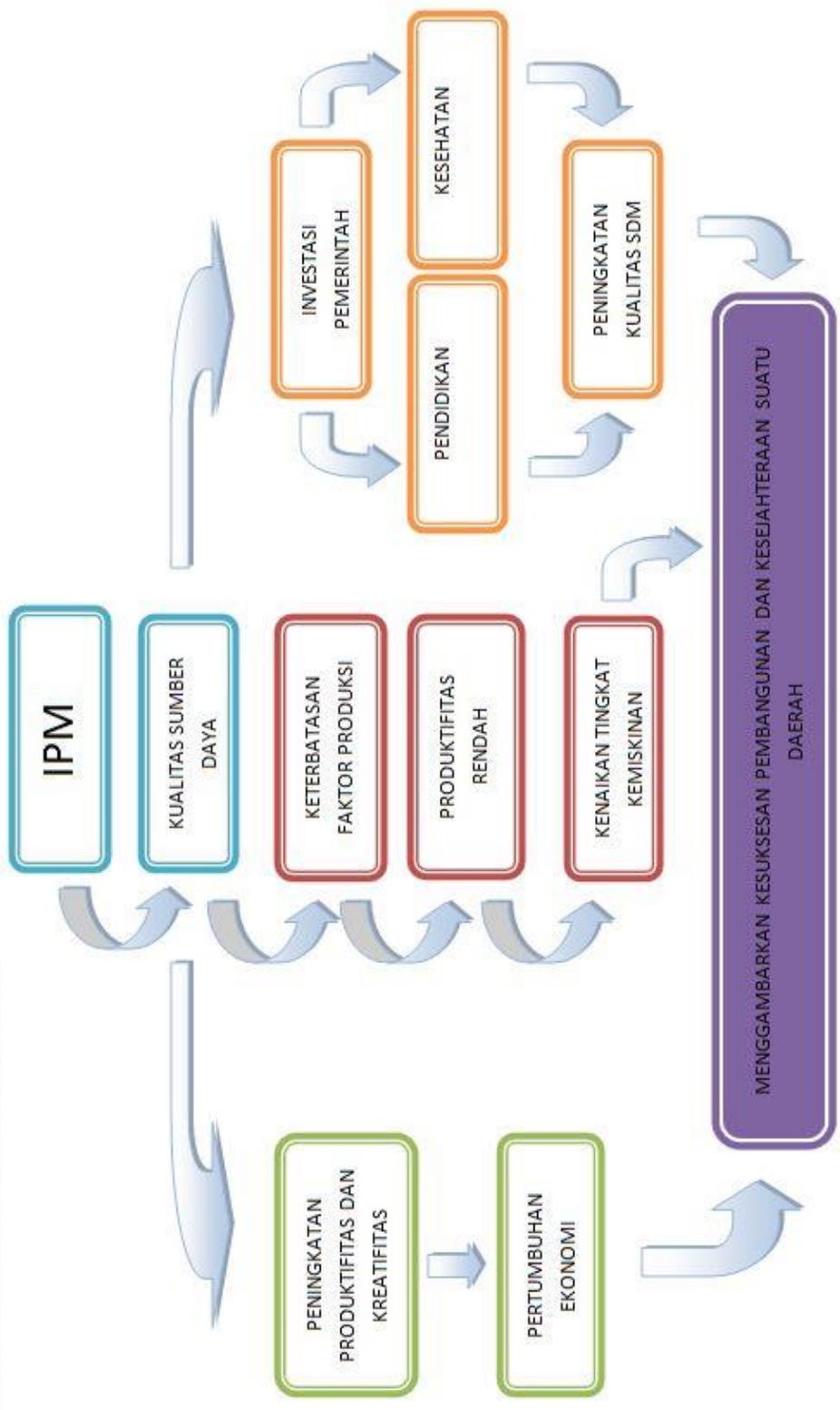
2.3. Kerangka Pikir

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal dengan *Human Development Index*. Dimana indikator ini digunakan sebagai indikator dalam

mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya menurut M. Ilham Irawan (2009) dalam judul penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB), anggaran pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan sedangkan penanaman modal dalam negeri berpengaruh tidak signifikan namun memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Lebih lanjut Alex Febrianto M (2009) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi, dimana pengangguran dan inflasi berpengaruh positif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian mengenai IPM khususnya di Kabupaten Malang maka variabel yang akan di ukur, yaitu: pertumbuhan ekonomi (PDRB), persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Alasannya dalam pemilihan variabel penelitian ini adalah berdasarkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itulah dalam menguji pengaruh faktor (pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan) terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

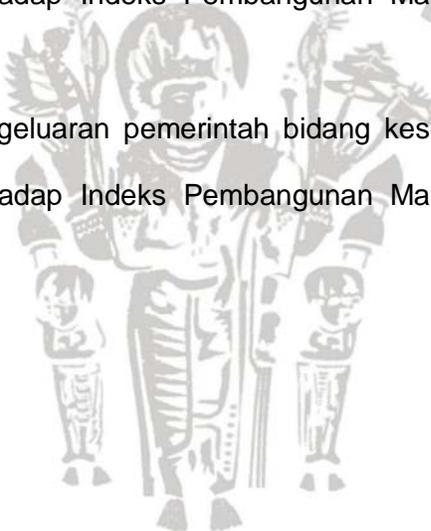


Gambar 2.1: Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka yang menjadi hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang.
2. Diduga pula persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang.
3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang.
4. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan, serta waktu, biaya dan tenaga dapat dihemat seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan April 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk kurun waktu (*time series*) tahunan mulai dari tahun 2000-2015 yang bersifat data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui pengumpulan beberapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Serta tahap kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa penelitian. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Malang, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disampaikan melalui media cetak. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber website yang bersangkutan.

3.3 Metode Analisis

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots 1$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear berganda (*multiple regression*) dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \dots\dots\dots 2$$

Dimana :

- Y = Indeks pembangunan manusia (persen)
- α = Intercept
- X_1 = Pertumbuhan ekonomi (persen)
- X_2 = Persentase penduduk miskin (persen)
- X_3 = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (milyar)
- X_4 = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (milyar)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi
- ϵ = Terms of error

1. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen dimana nilai R_2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R_2 < 1$) semakin besar nilai

R_2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variable dependen.

2. Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan perumusan bentuk hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : b_i = b$

$H_a : b_i \neq b$

Dimana b_i adalah koefisien variabel independen ke i nilai parameter hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y . pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

3. Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_1 \neq 0$(ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membanddingkan nilai F-hitung dengan F- tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika F-hitung < F-tabel maka H_0 diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan

rumus :



$$F\text{-Hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{1 - (R^2) / (n - K)}$$

Di mana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variable independen

n = Jumlah sampel

4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak biasa atau bahkan menyestatkan, maka perlu digunakan uji penyimpangan asumsi klasik.

a) Multikolinerity

Multikolinerity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah didalam model regresi tersebut terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolineritas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terdapat variabel dependennya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinerity dapat dilihat dari nilai R^2 F-hitung, t- hitung dan standar error

Adanya multikolinerity ditandai dengan :

- Standart error tidak terhingga
- Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori
- Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$
- R^2 = sangat tinggi

b) Autokorelasi (Serial Correlation)

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota- anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*).

Autokorelasi ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama.

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Ada beberapa cara untuk menguji autokorelasi, yaitu sebagai berikut :

a. Dengan memplot atau menggunakan grafik

b. Dengan uji Durbin-watson (uji D-W Test)

Uji D-W dapat dirumuskan sebagai berikut :

D-hitung = Dengan hipotesis sebagai berikut :

$$D - \text{Hitung} = \frac{\sum(\hat{\epsilon}_t = \hat{\epsilon}_t - 1)^2}{\sum \hat{\epsilon}^2 t}$$

Dengan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : $\rho = 0$, artinya tidak ada autokorelasi

H_a : $\rho \neq 0$, artinya ada autokorelasi

3.4 Definisi Operasional Variabel

Seperti telah dijelaskan di atas, maka batasan variabel dari penelitian ini, antara lain :

1. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun yang diproyeksi dengan PDRB menurut harga konstan dalam satuan persen.

3. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau kehidupan minimum terhadap total penduduk

Kabupaten Malang menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan persen.

4. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan adalah merupakan besarnya pengeluaran pemerintah Provinsi Kabupaten Malang untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Variabel tersebut dihitung pertumbuhannya setiap tahun dalam satuan persen.

5. Pengeluaran pemerintah atas kesehatan adalah besarnya alokasi belanja kesehatan pemerintah yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Variabel tersebut dihitung pertumbuhannya setiap tahun dalam satuan persen.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah, dan IPM tahun 2000 – 2015.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus sasaran aktivitas dengan seluruh kegiatan pembangunan yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya manusia guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup yang layak, peningkatan derajat kesehatan agar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Sebelum dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) maka terlebih dahulu akan disajikan analisis perkembangan dengan variabel yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan naik/turunnya faktor pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan (tahun 2000 s/d tahun 2015).

Berikut ini akan disajikan perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) untuk tahun 2000 s/d tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)
2000	3,85
2001	4,25
2002	4,30
2003	4,36
2004	5,53
2005	6,11
2006	5,33
2007	6,15
2008	5,44
2009	5,02
2010	6,27
2011	6,65
2012	6,67
2013	5,30
2014	6,01
2015	5,27

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2015

Dari data tabel perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang di tabel 4.1 nampak bahwa dari tahun 2000 mengalami kenaikan sampai tahun 2005 kemudian mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu 2006 senilai 5,33% lalu kembali mengalami kenaikan dalam rentang tahun 2010-2013.

Dan terakhir pada tahun 2015 mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2014 yang berhasil menembus angka 6 persen.

Kemudian akan disajikan data tingkat kemiskinan tahun 2000-2015 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2000-2015

Tahun	Tingkat kemiskinan (dalam persen)
2000	14.88
2001	14.68
2002	14.77
2003	13.52
2004	13.86
2005	17.19
2006	20.17
2007	19.24
2008	15.08
2009	13.57
2010	12.54
2011	11.67
2012	11.04
2013	11.44
2014	11.07
2015	10.96

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang memiliki trend yang terus turun hingga sampai pada angka 13,86%. Hingga pada tahun 2005-2007 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu menyentuh angka 20,17%

pada tahun 2006. Kemudian kembali mengalami penurunan secara perlahan sampai pada tahun 2015 yang berada diangka 10.96%.

Kemudian akan disajikan perkembangan tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

Tahun	Dalam persen	Dalam Rp (milyar)
2000	2.67	209,74
2001	10.45	215,50
2002	13.64	249,54
2003	20.77	288,96
2004	27.90	400,74
2005	3.04	413,36
2006	(3.88)	397,29
2007	0.46	399,14
2008	3.59	413,47
2009	35.21	559,08
2010	(2.01)	547,88
2011	50.01	821,87
2012	(9.41)	744,46
2013	(3.69)	716,95
2014	0.19	718,31
2015	(0.94)	711,55
Rata-rata Kenaikan = 9,25%		

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2015

Dari tabel 4.3 yakni perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD untuk tahun 2000 s/d tahun 2015 yang

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 9,25% pertahun,

Tabel 4.4 Tingkat pertumbuhan Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

Tahun	Dalam Persen	Dalam Rp (milyar)
2000	0,45	31,27
2001	2,78	32,17
2002	4,16	33,57
2003	5,54	35,54
2004	6,92	38,19
2005	8,30	41,65
2006	9,68	46,12
2007	51,17	69,72
2008	30,61	91,08
2009	7,03	97,49
2010	(17,41)	80,51
2011	10,21	88,73
2012	30,19	127,11
2013	(14,21)	108,94
2014	60,13	174,45
2015	(19,33)	141,69
Rata-rata kenaikan = 11,01%		

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2015

sedangkan di sektor kesehatan rata-rata meningkat sebesar 11,01%. Hal ini disebabkan karena salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 4.5 Kolmogorov – Smirnov test

		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68175361
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.833
Asymp. Sig. (2-tailed)		.491

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data program SPSS

Dari data tabel pengujian *One-sample Kolmogorov-Smirnov test* diatas maka dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal karena nilai Asymp Sig > dari 0,05. Berarti dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi persyaratan kelayakan regresi.

4.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui adanya keterikatan antara variabel independen, dengan kata lain bahwa setiap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya, sehingga untuk mengetahui apakah ada kolinearitas dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari nilai *variance*

inflation factor (VIF). Batas nilai VIF yang lebih dari 10 menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi, apabila terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4.6 Collinearity Statistic

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	67.144	4.683		14.339	.000		
	Pertumbuhan_Ekonomi	1.560	.752	.448	2.076	.006	.589	1.696
	Tingkat_Kemiskinan	-.502	.189	-.464	-2.663	.022	.907	1.103
	Pendidikan	.026	.043	.122	.601	.038	.667	1.499
	Kesehatan	.045	.041	.256	1.083	.002	.493	2.027

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil olah data program SPSS

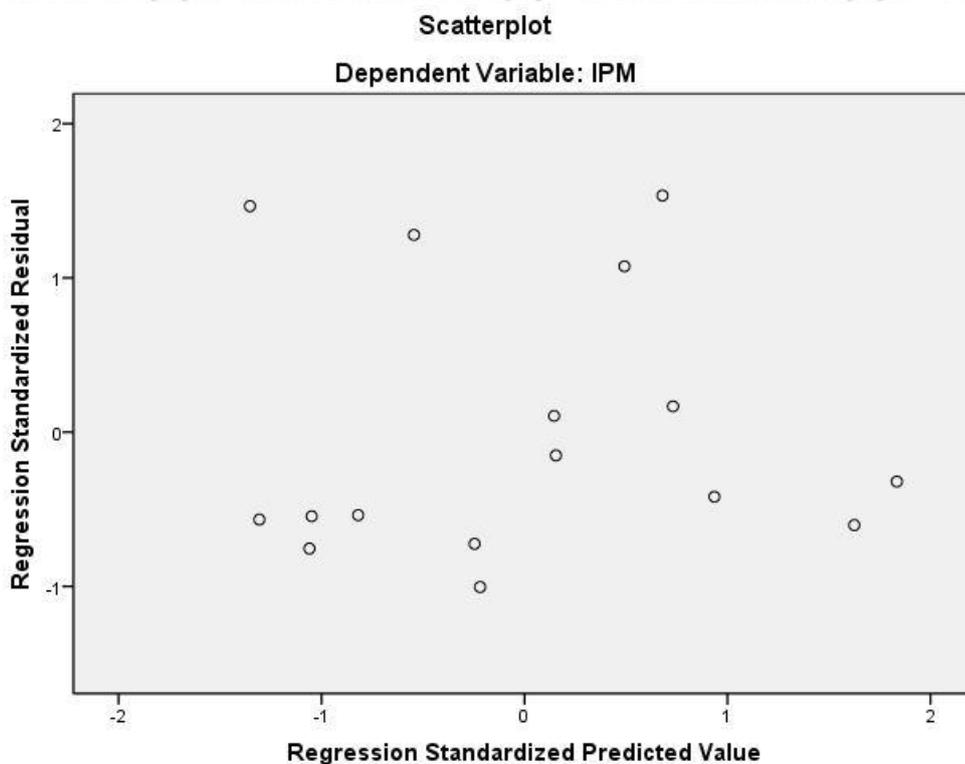
Berdasarkan tabel 4.6 mengenai hasil uji multikolineritas nampak bahwa semua variabel independent yakni pertumbuhan ekonomi (PDRB), persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, memiliki nilai VIF dibawah dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1.

Dari hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat tidak terjadi permasalahan multikolinearitas dan dapat memenuhi asumsi klasik.

4.2.3 Heterokedasitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat *Scatterplot* (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *Scatterplot*, seperti pada gambar berikut ini:

Tabel 4.7 Scatterplot



Sumber: Hasil olah data program SPSS

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.

4.2.4 Autokorelasi

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data time series maka diperlukan adanya uji asumsi terbebas dari autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi, dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 4.8 Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.885 ^a	.868	.860	1.96387	1.980

a. Predictors: (Constant), Kesehatan, Tingkat_Kemiskinan, Pendidikan, Pertumbuhan_Ekonomi

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil olah data program SPSS

Nilai DW hitung sebesar 1.980 lebih besar dari 1.935 dan lebih kecil dari 2.065 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Hasil Regresi

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan variabel tidak bebas (*dependent variable*) pada suatu variabel bebas (*independent variable*) dengan maksud untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Pada penelitian ini digunakan model regresi berganda dengan variabel dependen (variabel terikat) berupa indeks pembangunan manusia (Y) dan variabel independen (variabel bebas) berupa pertumbuhan ekonomi (PDRB) (X_1), Persentase penduduk miskin (X_2), Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_3), dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_4). Model hubungan yang terbentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$$

Setelah semua variabel dimasukkan, penyelesaian model persamaan regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Program For Social Science*) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil regresi antara pertumbuhan ekonomi (PDRB), persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil uji regresi menggunakan SPSS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1.	(Constant)	67.144	4.683			14.339	.000		
	Pertumbuhan_Ekonomi	1.560	.752	.448		2.076	.006	.589	1.696
	Tingkat_Kemiskinan	-.502	.189	-.464		-2.663	.022	.907	1.103
	Pendidikan	.026	.043	.122		.601	.038	.667	1.499
	Kesehatan	.045	.041	.256		1.083	.002	.493	2.027

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil olah data program SPSS

Berdasarkan dengan data yang ada pada tabel 4.9 yakni hasil olahan data regresi, maka persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$y = 67,144 + 0,448x_1 - 0,464x_2 + 0,122x_3 + 0,256x_4$$

Persamaan regresi tersebut di atas dapat diterjemahkan secara statistik sebagai berikut: β_0 = 67,144 yang diartikan tanpa kenaikan pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka indeks pembangunan manusia sebesar 67,144%

β_1 = 0,448 yang artinya dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,448% dengan asumsi $X_2, X_3,$ dan X_4 constant.



$\beta_2 = -0,464$ yang artinya dengan adanya peningkatan persentase penduduk sebesar 1% miskin maka akan diikuti oleh penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0,464% dengan asumsi X_1, X_3, X_4 constant.

$\beta_3 = 0,122$ yang artinya dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 1% dapat diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,122% dengan asumsi X_1, X_2, X_4 constant.

$\beta_4 = 0,256$ yang artinya dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 1% dapat diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,256% dengan asumsi X_1, X_2, X_3 constant.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, sedangkan nilai koefisien korelasi antara -1 sampai dengan 1. Apabila nilai *adjusted* R^2 sama dengan nol, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai *adjusted* R^2 sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Seperti hasil output model *summary* pada tabel 4.8, terlihat koefisien determinasi sebesar 0,860 artinya variasi variabel dependen (Y) dalam hal ini

indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen pertumbuhan ekonomi (X_1), persentase penduduk miskin (X_2), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X_3) dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X_4) hanya sebesar 86,60% dan selebihnya yakni sebesar 13,40% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

4.5 Uji Statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji F dilakukan hanya untuk menguji kesesuaian model, dan tidak ditujukan untuk menguji hipotesis. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji statistik F (F-test) yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Anova

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.989	4	24.497	6.352	.007 ^a
	Residual	42.424	11	3.857		
	Total	140.413	15			

a. Predictors: (Constant), Kesehatan, Tingkat_Kemiskinan, Pendidikan, Pertumbuhan_Ekonomi

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil olah data program SPSS

Berdasarkan uji ANOVA atau F-test dari output SPSS yang terlihat pada tabel tersebut di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,007. Karena nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai alpha 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (Y) atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (X_1), persentase penduduk miskin (X_2), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X_3), dan pengeluaran pemerintah

di bidang kesehatan (X4) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun cukup baik.

4.6 Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibuat, yaitu:

H₁: Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

H₂: Persentase penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

H₃: Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

H₄: Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t atau uji signifikan. Dari hasil output

SPSS, terlihat bahwa kelima variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) (X₁), persentase penduduk miskin (X₂), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X₃), dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X₄) dapat dikatakan berpengaruh signifikan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia.

Dari hasil output SPSS diperoleh nilai pvalue sebesar 0,006, karena nilai pvalue kurang dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian hipotesis 1 terbukti, hal ini sesuai dengan teori dari hasil penelitian Midgley (1995) yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas.

2. Pengaruh tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil uji regresi antara persentase penduduk miskin dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai pvalue sebesar 0,022.

Karena nilai $pvalue = 0,022 < 0,05$ berarti dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti, hal ini sejalan dengan teori dimana menurut UNDP (1996) bahwa banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia dan dari teori hasil penelitian Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis regresi antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai $pvalue = 0,038$, sehingga dapat dikatakan ada

pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia, alasannya karena memiliki nilai $pvalue$ $0,038 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis tiga terbukti. Hal ini sesuai dengan teori hasil penelitian Meier dan Rauch (2000) bahwa pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

4. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis regresi antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai $pvalue = 0,002$, sehingga dapatlah dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia, alasannya karena memiliki nilai $pvalue$ $0,002 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis empat terbukti. Hal ini sejalan dengan teori dari hasil penelitian Setiawan (2006) kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Malang, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai $\text{sig} = 0,006 < 0,05$, karena nilai sig kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.
2. Pengaruh jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Malang berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai $\text{sig} 0,022 < 0,05$ berarti ada pengaruh negatif dan signifikan dengan IPM.
3. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai $\text{sig} = 0,038 < 0,05$, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM yang memiliki nilai $\text{sig} 0,02 < 0,05$, karena nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.

5.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

- Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro.
- Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

2. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan maupun perkotaan.
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
- Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.

3. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

- Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

- Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)

- Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi
- Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di puskesmas maupun rumah sakit

4. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa. Serta memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti.



DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Bappenas. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

-----, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFU UGM.

BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS, 2004. *National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.

Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.

Corel Asion, 2009 , *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.

Dalimunthe, Masniary. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Emil Salim, 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ginting, Karisma Kuriata. 2008. *Analisis Pembangunan Manusia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba.

Hendra Esmara, 1986, *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia*. www.googlebooks.co.id. Diakses Februari 2017.

Hasil hasil pembangunan Kabupaten Malang 2015. Malang: Bappeda Kabupaten Malang.

Hutabarat, 1994, *Kebijakan Pembangunan dan Kemiskinan*. www.reformed-crs.org. Diakses April 2017.

Ilham Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2012, Edisi Tahun 2013. Kabupaten Malang.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013. Edisi Tahun 2014. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2013. Edisi Tahun 2014. Kabupaten Malang

Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.

M, Alex Febrianto. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanudin.

Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, Edisi-III. Yogyakarta: BPFE

Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Meier & Rauch. 2000. *Pioneer Of Development Economic*. www.googlebooks.co.id. diakses April 2017.

Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Yogyakarta: YKPN

Musgrave. 1980. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Erlangga

Midgley. 1995. *Social Development*. www.books.google.com. Diakses April 2017

Nasikun. 2001. *Kemiskinan (Konsep & Penyebab)*. www.digilib.unila.ac.id.
Diakses April 2017.

Napitupulu. 2007. *Pengaruh Komposit Index IPM Terhadap Penurunan Kemiskinan*. www.repository.ugm.ac.id. Diakses April 2017.

Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro II*. Yogyakarta: BPFE UGM

Raniv, Gustav. 2004. *Human Development And Economic Growth*. Yale University.

Samuelson, Paul & D. Nordhaus, William. 1992. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Sinha, Nistha. 2007. *Gender Equality, Poverty, And Economic Growth*. World Bank.

Sitepu, Rasidin. dan Bonar, Sinaga. 2004. *Dampak Investasi SDM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia*. www.repository.ugm.ac.id. Diakses April 2017.

Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001.

Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suparmoko. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: PT. Salemba Emman Patria.

Trifani, Irna. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur*. Jawa Timur: Universitas Jember

Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

UNDP. 2000. *Human Development Report*. www.undp.com. Diakses April 2017.

UNDP. 1995,. *Human Development Report*. www.hdrundp.org. Diakses April 2017.

